

**IMPLICATIONS OH THE RELATIONSHIP BETWEEN THE
CENTRAL GOVERNMENT AND LOCAL GOVERNMENTS AS A
RESULT OF DISHARMONIZATION OF LOCAL REGULATIONS**

***IMPLIKASI HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH AKIBAT DISHARMONISASI
PERATURAN DAERAH***

Sarah Marella^{1*}, Fahmi Ramadhan Firdaus²

^{1*,2}Faculty of Law, Universitas Jember, Indonesia

*marellasarah14@gmail.com

Volume 4, Number 2, September 2025

Received: June 21, 2025 Accepted: June 21, 2025 Online Published: October 7, 2025.

ABSTRACT

Disharminizationin localregulations occurs as a result of the phenomenon of over-regulation in Indonesia, which is growing increasingly prevalent. Findings in several regional regulations in Indonesia indicate that disharmony has a significant impact on the implementation of policies that directly affect the community. This issue of disharmony then has implications for the relationship between the central government and local governments as the authorities responsible for formulating and supervising local regulations. The centralgovernment is the main authority that controls the administration of the state throughout the territory, while local governments, acting in the name of regional autonomy, are the force that administers matters within their authority. Using a normative juridical method with conceptual, legislative, and comparative research types, this study finds common ground in the problems faced in the relationship between the central government and local governments regarding the issue of disharmony in regional regulations. These problems include the position of regional regulations in the framework of legislative theory, which is then viewed in comparison with Japan in organizing its legislation and the relationship between the central and regional governments in supervising regional regulations.

Keywords : Disharmonization; Local Regulations; Government.

ABSTRAK

Disharmonisasi dalam peraturan daerah terjadi akibat adanya fenomena over regulasi di Indonesia yang semakin subur perkembangannya. Temuan dalam beberapa peraturan daerah di Indonesia menandakan jika adanya disharmonisasi memiliki pengaruh besar dalam realisasi kebijakan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Permasalahan disharmonisasi ini kemudian berimplikasi pada hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pemangku otoritas dalam membentuk dan mengawasi peraturan daerah. Pemerintah pusat sebagai pijakan utama yang memegang kendali atas penyelenggaraan negara di seluruh wilayah sedangkan pemerintah daerah yang mengatasnamakan otonomi daerah menjadi kekuatan untuk menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan tipe penelitian konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan, penelitian ini menemukan titik temu permasalahan yang dihadapi dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait persoalan disharmonisasi pada peraturan daerah. Permasalahan tersebut antara lain terkait kedudukan peraturan daerah dalam kerangka teori peraturan perundang-undangan yang kemudian diberikan pandangan dengan perbandingan dengan negara Jepang dalam menata perundang-undangannya dan hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam mengawasi peraturan daerah.

Kata Kunci : Hukum Lingkungan; Keadilan Sosial; SDG 11.